

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi secara global yang menyeluruh sehingga tidak ada seorang pun yang terlewatkan. Menurut Patiung (2017) tujuan dari SDGs adalah untuk mempertahankan kesejahteraan ekonomi masyarakat, mempertahankan kehidupan sosial masyarakat dan mempertahankan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan, mewujudkan keadilan sehingga terlaksananya tata kelola yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat secara terus menerus. SDGs mempunyai 17 tujuan dan 169 target yang di harapkan mampu dicapai pada tahun 2030 nanti. Pada tujuan ke-16 SDGs terdapat beberapa target seperti : (1) Secara signifikan mengurangi semua macam kekerasan terhadap siapapun; (2) Mengakhiri perlakuan kejam, eksploitasi dan perdagangan; (3) Mendukung lembaga hukum pada tingkat nasional dan keadilan yang merata ; (4) Di tahun 2030, mampu mengurangi aliran dana gelap, senjata terlarang dan meminimalisir semua jenis tindak kejahatan kriminal yang terorganisir secara signifikan.

Pada dasarnya kriminalitas berasal dari kata “*crimen*” yang berartikan kejahatan atau juga dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan kejahatan, sehingga termasuk tindakan yang bersifat negatif atau merugikan. Istilah kriminal memiliki definisi yang begitu beragam. Menurut Kepolisian Negara Republik Indonesia (2020) tindak kejahatan atau kriminalitas yaitu tindakan seseorang yang

melanggar ketentuan hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan lain yang sah dan berlaku di Indonesia.

Perkembangan zaman ataupun perkembangan teknologi yang terus maju akan mengakibatkan perilaku kriminalitas pun mengalami perubahan, baik pada segi jenis kejahatan ataupun cara melakukannya. Kriminalitas merupakan bagian dari kehidupan masyarakat karena kriminalitas atau kejahatan merupakan masalah yang sangat lumrah terjadi pada masyarakat di negara manapun termasuk Indonesia. Dilihat dari tempat dan jangka waktunya tindakan kriminalitas dapat saja terjadi di berbagai wilayah dalam jangka waktu yang sama ataupun berbeda.

Pada wilayah kota-kota besar biasanya memiliki beberapa masalah sosial seperti tingginya angka kejadian kejahatan. Bahkan, masalah yang ada pada kota-kota besar dapat berujung pada tindakan kriminalitas. Berdasarkan artikel yang di rilis oleh PortalBangkalan.com terdapat 10 kota di Indonesia yang memiliki tingkat kriminalitas tertinggi, kota-kota tersebut antara lain sebagai berikut :

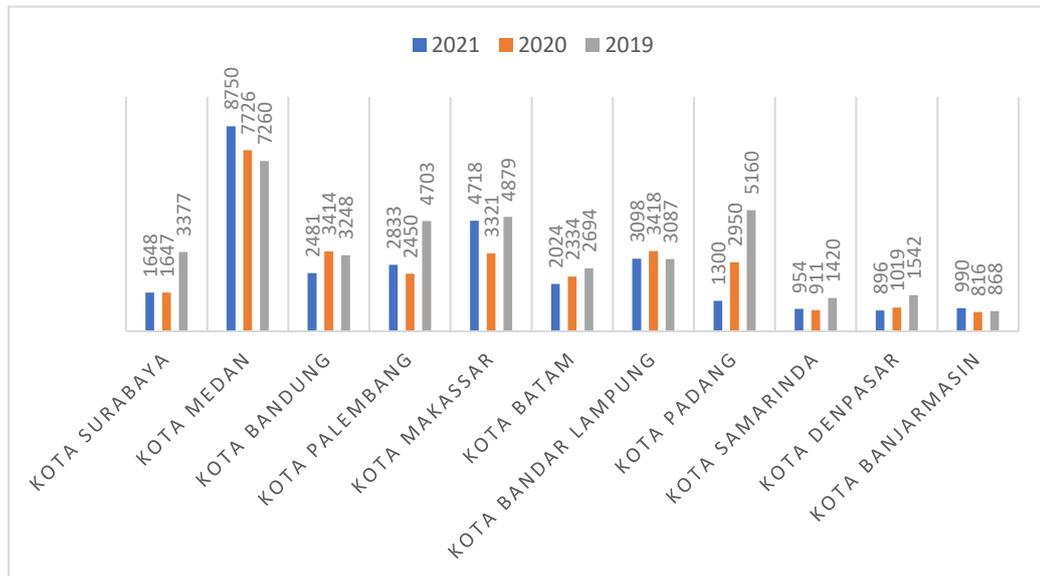
Tabel 1.1 10 Kota Dengan Tingkat Kriminalitas Tertinggi Di Indonesia

No	Nama Kota	Jumlah Kejahatan
1.	Jakarta	8112
2.	Medan	7726
3.	Makassar	3240
4.	Palembang	2833
5.	Bandung	2481
6.	Surabaya	2108
7.	Pekanbaru	1450
8.	Tangerang Selatan	1402
9.	Bekasi	1365
10.	Padang	1300

Sumber : Badan Pusat Statistika dan Polresta tahun 2020 dan 2021

Berdasarkan informasi di atas, kejadian tindak kriminalitas tertinggi di Indonesia banyak terjadi pada kota-kota besar. Banyaknya kejadian kejahatan pada kota-kota besar menjadi perhatian penting, ada beberapa anggapan bahwa tatanan sosial pada daerah perkotaan dapat memunculkan kriminalitas. Broom dan Szelnik dalam Tutrianto (2018) berpendapat bahwa kemajuan kota tidak terlepas dari adanya konflik yang akan menimbulkan kriminalitas pada wilayah perkotaan itu sendiri. Banyaknya kejadian kejahatan yang terjadi pada suatu wilayah dapat memberikan gambaran bagaimana kondisi tingkat kriminalitas pada wilayah tersebut.

Menurut peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional pada pasal 12 dan pasal 16 menjelaskan bahwa dilihat dari banyaknya penduduk, yang dimaksud kota besar ialah kota dengan penduduk lebih dari 500.000 jiwa. Kota-kota besar yang dimasukkan dalam penelitian ini yaitu kota-kota yang mewakili provinsi pada lima pulau yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan Pulau Bali dengan kriteria jumlah penduduk lebih dari 500.000 jiwa. Pada Pulau Sumatera dipilih Kota Medan, Kota Palembang, Kota Batam, Kota Bandar Lampung dan Kota Padang. Pada Pulau Jawa dipilih Kota Surabaya dan Kota Bandung. Pada Pulau Kalimantan dipilih Kota Samarinda dan Kota Banjarmasin. Pada Pulau Sulawesi dipilih Kota Makassar dan pada Pulau Bali dipilih Kota Denpasar. Berikut ini data perkembangan jumlah kriminalitas pada kota-kota besar di Indonesia tahun 2019-2021 :



Sumber : Dokumen provinsi dalam angka dan statistik politik dan keamanan (BPS)

Gambar 1.1 Jumlah Kriminalitas Pada Kota-Kota Besar Di Indonesia Tahun 2019-2021 (Kasus)

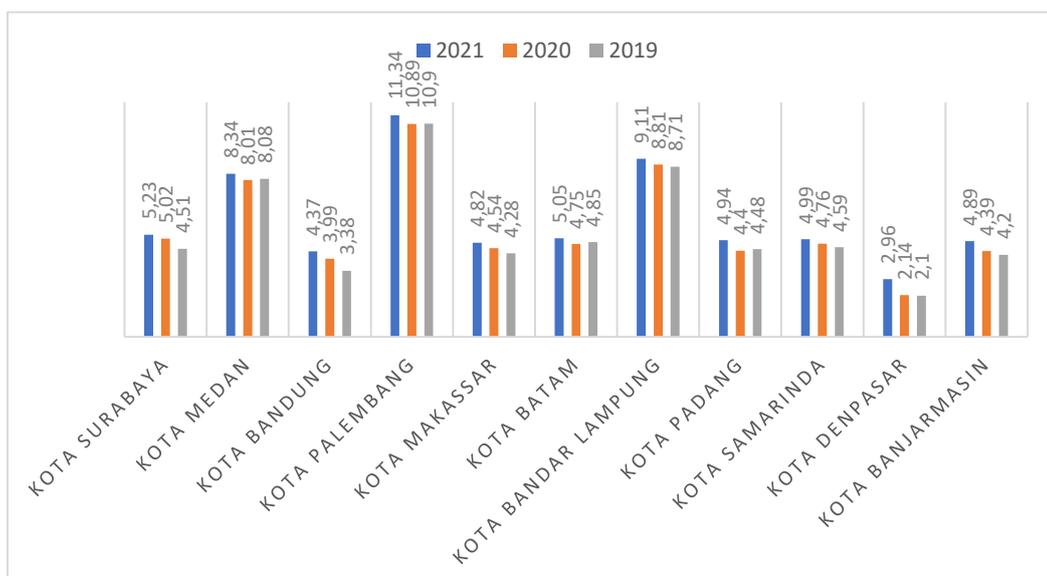
Dilihat dari gambar 1.1 di atas mengenai jumlah kriminalitas pada kota-kota besar di Indonesia tahun 2019-2021, dalam kurun waktu 3 tahun berturut-turut Kota Medan menjadi kota dengan jumlah kejahatan paling tinggi dibandingkan dengan kota yang lain. Sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 Kota Banjarmasin menjadi kota dengan jumlah kejahatan paling rendah dan pada tahun 2021 jumlah tindakan kejahatan terendah terjadi di Kota Denpasar. Dari data di atas terdapat beberapa kota yang mengalami penurunan aksi kriminalitas pada tahun 2021, kota-kota tersebut adalah Kota Padang, Kota Bandar Lampung, Kota Batam, Kota Bandung dan Kota Denpasar sedangkan kota-kota yang mengalami kenaikan aksi kriminalitas pada tahun 2021 adalah Kota Makassar, Kota Palembang, Kota Medan, Kota Surabaya Kota Samarinda dan Kota Banjarmasin.

Kriminalitas merupakan persoalan penduduk yang berdampak luas dan berdampak bagi tatanan kehidupan masyarakat. Becker (1968) menjelaskan bahwa kriminalitas akan mengakibatkan kerugian pada masyarakat (*sosial loss*). Perbuatan kriminalitas termasuk kedalam eksternalitas *negative* karena dampak dari kriminalitas tersebut akan merugikan masyarakat contohnya seperti berkurangnya kesejahteraan, keamanan dan ketertiban atau membebankan biaya ekonomi dan sosial kepada pihak lain. Kriminalitas dapat terjadi karena adanya tekanan ekonomi atau dikarenakan adanya peluang yang didukung dengan adanya faktor internal berupa kebutuhan ekonomi, kesejahteraan, dan sebagainya. Faktor ekonomi menjadi salah satu motif seseorang melakukan kriminalitas, biasanya para pelaku tindak kriminalitas adalah individu dengan pendapatan yang rendah.

Perkembangan keadaan sosial ekonomi sangat dinamis sehingga menarik untuk di bahas termasuk keadaan dan masalah sosial ekonomi pada kota-kota besar di Indonesia, ada beberapa indikator yang dapat memperlihatkan kondisi sosial ekonomi, salah satu indikator tersebut adalah kependudukan, kemiskinan, pendidikan, ketenagakerjaan dan pendapatan.

Kemiskinan merupakan suatu isu yang telah ada sepanjang sejarah manusia. Kemiskinan selalu muncul diberbagai tempat termasuk pada daerah di Indonesia. Pare dan Felson (2014) berpendapat bahwa individu yang berada dalam kemiskinan cenderung lebih berisiko untuk melakukan tindak kriminalitas. Kemiskinan merupakan salah satu akar dari kejahatan, kondisi tersebut menyebabkan suatu perbuatan atau perilaku yang sangat merugikan bagi korban dan merugikan masyarakat sekitarnya seperti hilangnya keseimbangan,

ketentraman, dan ketertiban. Dalam menurunkan kemiskinan dapat dilakukan dengan cara berfokus pada peningkatan akses layanan kesehatan, pendidikan dan daya beli pada kelompok yang mempunyai penghasilan rendah (Djulius, Lixian, Lestari, & Eryanto, 2022). Menurut Badan Pusat Statistika (2023) kemiskinan dipandang sebagai kondisi ketidakmampuan individu atau kelompok dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan *non* makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin pada pedesaan dan perkotaan memiliki karakteristik yang berbeda, biasanya kelompok penduduk miskin di perkotaan menetap di pemukiman yang tercemar dan kotor, kelompok penduduk miskin pada wilayah kota mempunyai potensi dapat memperburuk kualitas lingkungan hidup daripada penduduk miskin yang berada pada wilayah desa. Tingkat kemiskinan di suatu wilayah dapat dilihat dari persentasi penduduk miskin yang ada pada wilayah tersebut.



Sumber : Dokumen provinsi dalam angka (BPS)

Gambar 1.2 Persentasi Penduduk Miskin Pada Kota-Kota Besar Di Indonesia Tahun 2019-2021

Berdasarkan gambar 1.2 di atas mengenai persentase penduduk miskin pada kota-kota besar di Indonesia pada tahun 2019-2021, pada Kota Palembang memiliki kondisi kemiskinan yang tinggi dalam kurun waktu 3 tahun dibandingkan dengan kota yang lain sedangkan keadaan kemiskinan pada Kota Denpasar merupakan yang terendah dalam kurun waktu 3 tahun berturut-turut. Pada tahun 2021 data menunjukkan Persentase Penduduk Miskin pada setiap kota memiliki trend yang meningkat dari tahun 2020 ke tahun 2021.

Jika dibandingkan dengan gambar 1.1 tentang data jumlah aksi kriminalitas, pada Kota Medan di tahun 2021 terjadi kenaikan kemiskinan yang diikuti dengan kenaikan jumlah tindakan kriminalitas tetapi berbeda yang terjadi dengan Kota Batam pada tahun 2021 data menunjukkan terjadi kenaikan kemiskinan sedangkan pada tahun 2021 data jumlah tindak kriminalitas di Kota Batam menurun.

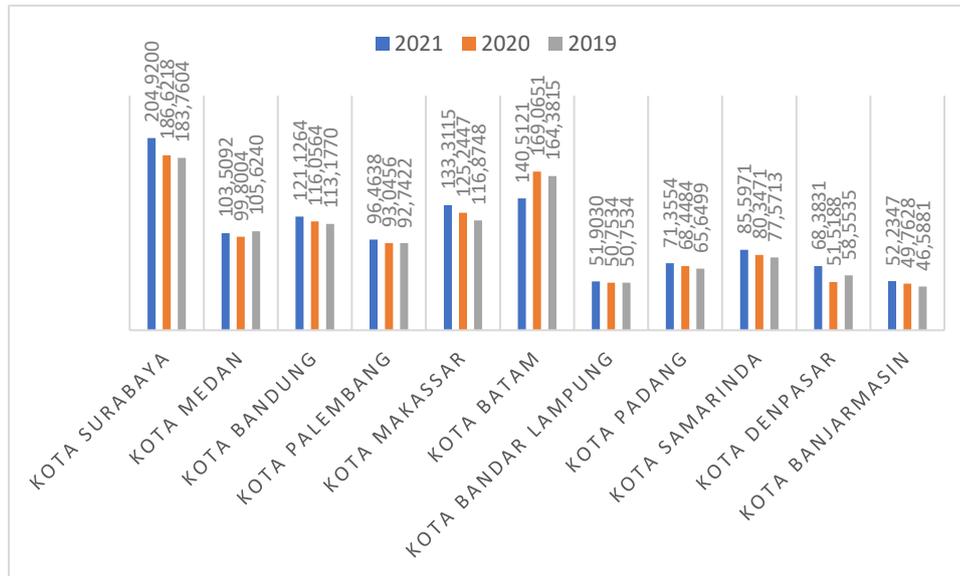
Menurut teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) oleh Nurkse bahwa kemiskinan terjadi karena adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar dan kekurangan modal yang akan berdampak pada rendahnya produktivitas. Produktivitas yang rendah akan mengakibatkan tingkat pendapatan yang dihasilkan menjadi rendah, kemudian nantinya akan berdampak pada kemampuan seseorang dalam menabung dan investasi.

Pada dasarnya semua daerah terus berupaya untuk mewujudkan kemajuan ekonomi salah satunya dengan cara mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan berkualitas. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari seberapa besar kenaikan PDRB daerah tersebut. Produk domestik

regional bruto (PDRB) merupakan total nilai tambah yang dihasilkan dari proses pengelolaan sumber daya oleh semua sektor perekonomian pada suatu daerah. Pada kenyataannya, setiap daerah mempunyai sumber daya yang berbeda-beda sehingga setiap daerah mempunyai kinerja yang berbeda dalam mencapai pertumbuhan ekonomi. PDRB dapat diukur melalui beberapa pendekatan salah satunya yaitu pendekatan pengeluaran, pendekatan ini mengacu pada pemakaian hasil produksi barang dan jasa pada suatu daerah. Selain itu PDRB juga dapat mencerminkan pendapatan suatu daerah, semakin tinggi PDRB suatu daerah memperlihatkan semakin makmur daerah tersebut, di sisi lain untuk melihat besarnya sebaran PDRB yang diterima oleh penduduk dapat dilihat dari seberapa besar nilai PDRB perkapita atau pendapatan daerah tersebut. PDRB perkapita memberikan gambaran seberapa besar rata-rata pendapatan yang diterima oleh satu orang penduduk.

Menurut Todaro dalam pramesti (2018) kemiskinan tercipta dikarenakan semakin lebarnya ketimpangan distribusi pendapatan dan rendahnya PDRB perkapita. Pada umumnya PDRB perkapita suatu daerah digunakan sebagai tolak ukur perbandingan kesejahteraan antar daerah. Ketika terjadi kenaikan nilai PDRB perkapita menandakan terjadi kenaikan kesejahteraan masyarakat atau terjadi kenaikan pendapatan penduduk, hal tersebut akan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan terpenuhinya kebutuhan hidup sehingga dapat terhindar dari kemiskinan. Pada daerah perkotaan yang umumnya menjadi sentral ekonomi dan memiliki penduduk yang relatif banyak hal tersebut menjadikan PDRB kota-

kota besar relatif lebih tinggi. Berikut ini data perkembangan PDRB perkapita kota-kota besar di Indonesia tahun 2019-2021 :

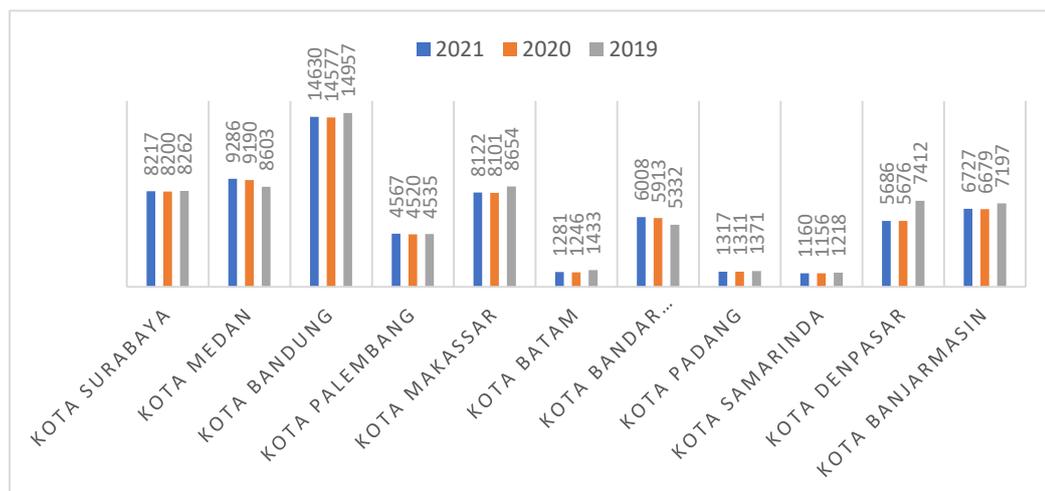


Sumber : Badan Pusat Statistika

Gambar 1.3 PDRB Perkapita Kota-kota Besar Di Indonesia Tahun 2019-2021 (Juta Rupiah)

Berdasarkan gambar 1.3 di atas mengenai PDRB perkapita kota-kota besar di Indonesia tahun 2019-2021, dalam kurun waktu 3 tahun berturut-turut Kota Surabaya menjadi kota dengan PDRB perkapita tertinggi dibandingkan dengan kota lain sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 Kota Banjarmasin menjadi kota dengan PDRB perkapita paling rendah dan pada tahun 2021 Kota Bandar Lampung menjadi kota dengan PDRB perkapita paling rendah. Dan pada kurun waktu 3 tahun trend PDRB perkapita pada kota-kota besar di Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Selain itu PDRB perkapita dapat mempengaruhi kriminalitas, hal itu dikarenakan ketika terjadi kenaikan PDRB perkapita akan membuat penduduk menjadi serba berkecukupan dan sejahtera sehingga akan mencegah seseorang untuk ikut pada aksi kriminalitas seperti pencurian.

Wilayah perkotaan memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang lebih baik dan lengkap hal itu menjadikan daya tarik sehingga akan mendorong urbanisasi, kemudian jika dilihat dari luas wilayahnya, wilayah kota mempunyai luas wilayah lebih kecil daripada luas wilayah kabupaten sehingga wilayah kota menjadi padat penduduk. Berdasarkan teori kependudukan Thomas Robert Malthus, pola kenaikan penduduk jauh lebih cepat daripada pola kenaikan sumber daya. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan mengakibatkan kepadatan penduduk. Menurut Mantra (2000) yang dimaksud dengan kepadatan penduduk ialah perbandingan antara banyaknya penduduk yang berada pada suatu daerah dengan luas wilayah yang ditempatinya Kepadatan penduduk dapat berakibat pada kelangkaan sumber-sumber daya. Kekurangan sumber daya akan mengakibatkan kemiskinan alamiah. Ketika tidak adanya pembatasan penduduk maka akan terjadi kelangkaan makanan, hal itu akan menjadi awal dari kesengsaraan dan kemiskinan manusia.



Sumber : Badan Pusat Statistika

Gambar 1.4 Kepadatan Penduduk Pada Kota-Kota Besar Di Indonesia Tahun 2019-2021 (Jiwa/Km²)

Berdasarkan gambar 1.4 diatas mengenai kepadatan penduduk pada kota-kota besar di Indonesia tahun 2019-2021, dilihat secara keseluruhan kepadatan penduduk pada kota-kota di atas melebihi 1000 jiwa/km², kemudian dalam kurun waktu 3 tahun (2019-2021) Kota Bandung memiliki kondisi kepadatan penduduk yang lebih tinggi pada setiap tahunnya dan Kota Samarinda memiliki kondisi kepadatan penduduk yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan kota lain. Pada tahun 2020 ke tahun 2021 semua kota mengalami pola kepadatan penduduk yang tumbuh, Mengingat daerah yang padat penduduk pada umumnya mengalami masalah sosial seperti keamanan. Selain itu kepadatan penduduk juga dapat mempengaruhi tindakan kriminalitas atau kejahatan. Banyaknya penduduk di suatu wilayah akan menambah banyaknya opsi target aksi kejahatan dan ruang gerak para pelaku kriminal akan semakin luas.

Kemudian salah satu kata kunci kemiskinan dapat dilihat dari kualitas sumber daya manusia atau kualitas penduduk yang tersedia. Pada umumnya definisi sumber daya manusia dapat dilihat dari aspek kualitas dan kuantitas. Kualitas sumber daya manusia dapat diartikan sebagai pengetahuan, bakat, kebiasaan yang memiliki sumbangsih terhadap produksi. Kualitas sumber daya manusia merupakan hal yang sangat vital dalam produksi dan untuk mengetahui bagaimana kualitas penduduk yang ada pada suatu daerah dapat dilihat dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah tersebut. Konsep IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 yang dipublikasikan secara berkelanjutan dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM terbentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu dimensi kesehatan

dengan menggunakan indikator angka harapan hidup, dimensi pendidikan dengan menggunakan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah kemudian dimensi standar hidup layak dengan menggunakan indikator pengeluaran perkapita. Nilai IPM yang tinggi memberikan gambaran bahwa terjadi peningkatan kualitas penduduk. Penduduk yang berkualitas akan mendorong produktivitas sehingga akan meningkatkan pendapatan dan taraf hidup yang lebih baik sehingga akhirnya akan terhindar dari kemiskinan. Oleh karena itu semakin tinggi nilai IPM maka semakin tinggi produktivitas penduduknya sehingga tingkat pendapatan yang diterima lebih baik dan sebaliknya jika nilai IPM rendah maka produktivitas penduduknya akan rendah. Pada umumnya IPM pada kota-kota besar relatif lebih tinggi hal itu salah satunya dikarenakan pembangunan pada kota-kota besar lebih pesat. Berikut ini perkembangan IPM pada kota-kota besar di Indonesia tahun 2019-2021 :



Sumber : Dokumen provinsi dalam angka (BPS)

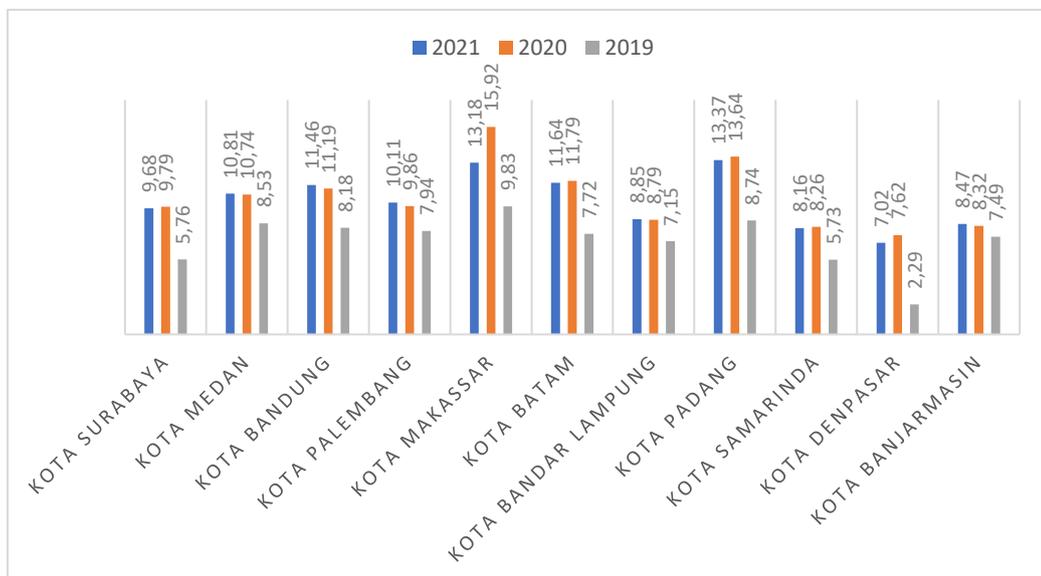
Gambar 1.5 IPM Pada Kota-Kota Besar Di Indonesia Tahun 2019-2021 (Indeks)

Berdasarkan gambar 1.5 mengenai IPM pada kota-kota besar di Indonesia pada tahun 2019-2021, dalam kurun waktu 3 tahun berturut-turut nilai IPM tertinggi dicapai oleh Kota Denpasar dan nilai IPM terendah dicapai oleh Kota Banjarmasin. Dilihat dalam kurun waktu 2020 sampai 2021 semua kota mengalami peningkatan indeks pembangunan manusia.

Di sisi lain, IPM dapat mempengaruhi kriminalitas hal itu dikarenakan IPM yang rendah memberikan gambaran bahwa kualitas penduduknya juga rendah, kualitas penduduk yang rendah akan rentan menjadi seorang kriminal sehingga mendorong tingkat kriminalitas menjadi naik. Kualitas penduduk yang baik mampu berpikir logis dan mampu mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dengan benar sehingga cenderung tidak ikut serta dalam kegiatan kriminal.

Pada umumnya wilayah perkotaan menjadi sentral kegiatan ekonomi, faktor tenaga kerja atau faktor sumber daya manusia dalam proses produksi sangatlah vital oleh karena itu banyak penduduk yang datang ke kota hanya untuk mengadu nasib atau mencari pekerjaan akan tetapi pada kenyataannya lapangan pekerjaan pada wilayah kota terbatas, pada kondisi tertentu lapangan pekerjaan yang ada tidak mampu menyerap tenaga kerja yang tersedia. Menurut Adioetomo (2010) pengangguran merupakan individu yang termasuk dari angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan. Pengangguran memberikan gambaran sumderdaya yang terbuang. Pengangguran merupakan salah satu persoalan yang cukup penting karena dapat mempengaruhi kehidupan manusia secara langsung. Pengangguran memiliki hubungan dengan kemiskinan karena seorang individu

yang sedang dalam keadaan tidak mengganggu akan memiliki pendapatan untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehingga memiliki taraf hidup yang lebih layak. Kemudian seorang individu yang bekerja memiliki kesempatan tabungan yang lebih baik sehingga memudahkan individu tersebut keluar dari jeratan kemiskinan. Cholili (2014) berpendapat bahwa adanya pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan. Berikut perkembangan tingkat pengangguran terbuka pada kota-kota besar tahun 2019-2021 :



Sumber : Badan Pusat Statistika

Gambar 1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka Pada Kota-Kota Besar Di Indonesia Tahun 2019-2021 (Persen)

Pada gambar 1.6 di atas mengenai tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada kota-kota besar di Indonesia tahun 2019-2021, pada kurun waktu 3 tahun beturut-turut kondisi TPT paling tinggi terjadi di Kota Makassar dan kondisi TPT terendah dicapai oleh Kota Denpasar. Dari tahun 2020 ke tahun 2021 terdapat beberapa kota yang mengalami kenaikan tingkat pengangguran, kota-kota tersebut yaitu Kota Medan, Kota Bandung, Kota Palembang, Kota Bandar Lampung dan

Kota Banjarmasin sedangkan kota-kota yang mengalami penurunan adalah Kota Surabaya, Kota Makassar, Kota Batam, Kota Padang, Kota Samarinda dan Kota Denpasar. Jika dibandingkan dengan data kemiskinan pada gambar 1.2, di tahun 2021 pada Kota Surabaya mengalami penurunan TPT diikuti dengan kenaikan kemiskinan sedangkan pada Kota Bandung selama 3 tahun (2019-2021) mengalami kenaikan TPT pada setiap tahunnya yang diikuti dengan peningkatan kemiskinan dari tahun 2019-2021.

Selain itu individu atau kelompok yang sedang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran berpotensi dapat menjadi seorang pelaku kriminalitas karena kondisi pengangguran akan memberikan tekanan psikologis dan tekanan ekonomi sehingga akan menghalalkan semua cara untuk memenuhi keperluan hidupnya.

Sesuai dengan apa yang sudah penulis jelaskan pada uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kejadian kriminalitas banyak terjadi pada kota-kota besar, kriminalitas merupakan tindakan yang sangat merugikan masyarakat dan kemudian kondisi kemiskinan, pengangguran dan kepadatan penduduk pada kota-kota besar harus menjadi perhatian. Maka penulis menganggap hal tersebut perlu dikaji lebih lanjut oleh karena penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Dan Dampaknya Terhadap Tingkat Kriminalitas Pada Kota-Kota Besar Di Indonesia Tahun 2014-2021”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perkembangan tingkat kriminalitas, tingkat kemiskinan, PDRB perkapita, kepadatan penduduk, indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran terbuka pada kota-kota besar di Indonesia tahun 2014-2021?
2. Bagaimana pengaruh PDRB perkapita, kepadatan penduduk, indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan pada kota-kota besar di Indonesia tahun 2014-2021?
3. Bagaimana pengaruh PDRB perkapita, kepadatan penduduk, indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kriminalitas pada kota-kota besar di Indonesia tahun 2014-2021?
4. Bagaimana pengaruh tingkat kemiskinan terhadap tingkat kriminalitas pada kota-kota besar di Indonesia tahun 2014-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan tingkat kriminalitas, tingkat kemiskinan, PDRB perkapita, kepadatan penduduk, indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran terbuka pada kota-kota besar di Indonesia tahun 2014-2021.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh PDRB perkapita, kepadatan penduduk, indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan pada kota-kota besar di Indonesia tahun 2014-2021.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh PDRB perkapita, kepadatan penduduk, indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran terbuka

terhadap tingkat kriminalitas pada kota-kota besar di Indonesia tahun 2014-2021.

4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat kemiskinan terhadap tingkat kriminalitas pada kota-kota besar di Indonesia tahun 2014-2021.

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan teoritis berupa informasi kajian ilmu ekonomi yang mencakup pengangguran, kemiskinan, PDRB perkapita dan kepadatan penduduk yang dikaitkan dengan ilmu sosial mencakup kriminalitas.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan lain dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pasundan Bandung.